BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI HAMBATAN *WORLD FOOD PROGRAMME* (WFP) DALAM MENYELESAIKAN KRISIS PANGAN SUDAN SELATAN

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dunia internasional, organisasi internasional tidak selalu berhasil dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan. *World Food Programme* (WFP) sebagai organisasi internasional yang berada dibawah sistem PBB yang menangani tentang bahaya kelaparan jelas memiliki fungsinya sebagai organisasi internasional.

Fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi operasional. Akan tetapi dari 5 fungsi tersebut, WFP tidak dapat menjalankan 3 fungsi diantaranya; pertama, fungsi pembuatan peraturan dalam hal ini fungsi ini bisa dikatakan sama dengan fungsi normatif dimana WFP tidak begitu berhasil dalam membuat aturan-aturan atau norma yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat, khususnya pemerintahan domestik suatu negara dimana WFP sedang menjalankan bantuannya seperti yang terjadi di Sudan Selatan. Kedua, fungsi pengawasan dalam hal ini karena fungsi pembuatan peraturan WFP di Sudan Selatan tidak baik maka WFP sangat sulit untuk melakukan fungsi ini. Dan kelima, fungsi operasional terkait dengan bantuan keuangan dalam hal ini WFP mengatakan sampai sekarang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan masalah krisis pangan di Sudan Selatan karena dana yang dibutuhkan tidak sesuai dana yang didapatkan. Melihat dari ketiga fungsi tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terwujudnya fungsi organisasi internasional khususnya bagi WFP di Sudan Selatan.

A. Ketidakstabilan Politik Pemerintah Sudan Selatan

Ketidakstabilan politik merupakan suatu keadaan dimana sedang terjadinya konflik, perang, kudeta dan hal-hal yang membuat pemerintahan suatu negara tidak berjalan dengan baik. Pada umumnya terjadinya ketidakstabilan politik pada suatu negara terjadi akibat konflik domestik yang ada pada negara tersebut.

Konflik merupakan permasalah yang terjadi diantara beberapa pihak dan diakibatkan oleh berbagai perbedaan pemahaman mengenai satu atau beberapa hal. Pada suatu negara, konflik dapat menyebabkan terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik. Biasanya konflik sering terjadi antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, dan pada internal pemerintah itu sendiri.

Pada Sudan Selatan, konflik sebenarnya telah terjadi sebelum negara ini resmi merdeka melalui suatu referendum. Pada 2017, perang saudara Sudan Selatan memasuki tahun keempatnya, menyebar ke seluruh negeri dengan pertempuran baru di Greater Nil Atas, Bahr al Ghazal Barat, dan Khatulistiwa, menampilkan operasi kontra-pemberontakan pemerintah yang sangat kejam. Pemerintah terus membatasi media, menekan kritik, dan secara tidak sah menahan orang-orang karena dianggap sebagai oposisi. Sejak awal konflik, hampir 2 juta orang telah terlantar secara internal, dan 2 juta lainnya telah mengungsi di negara-negara tetangga, dengan 1 juta di Uganda saja. Lebih dari 230.000 orang berlindung di enam pangkalan PBB di kota-kota di seluruh negeri. Kelaparan dideklarasikan di daerah-daerah yang dilanda konflik di bekas negara bagian Persatuan pada paruh pertama tahun ini. (Human Right Watch, 2017)

Terdapat beberapa konflik yang pada dasarnya konflik ini diakibatkan oleh terjadinya ketidakstabilan politik pada pemerintahan Sudan Selatan, konflik tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Konflik Minyak

Pertama, terkait konflik minyak yang dipicu pasca pemisahan kedua negara. Muncul rasa ketidaksukaan Sudan terhadap Sudan Selatan karena ladang minyak sebagian besar berada di Kawasan Sudan Selatan. Pada Kawasan Sudan Selatan terdapat beberapa perusahaan minyak yang beroperasi seperti Petrodar, GNPOC, dan *White Nile Petroleum Operating Company* (WNPOC)/Thar), sedangkan pada kawasan Sudan Utara hanya terdapat satu perusahaan minyak yang beroperasi yaitu *Petro Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company* (GNPOC). (Cahyanti, 2017, p. 87)

Baik Sudan Utara dan Sudan Selatan mendapatkan penghasilan negara dengan bergantung pada hasil minyak, sehingga dampak dari merdekanya Sudan Selatan membuat pendapatan Sudan Utara menjadi menurun signifikan. Manajer Proyek Sudan Selatan yaitu Wolf Christian Paes mengatakan pada *Bonn International Cntre Convertion* (BICC) bahwa “Kedua Sudan tergantung pada minyak. Di Selatan, 98% pendapatan pemerintah berasal dari sektor minyak. Untuk Utara tidak diketahui angka pastinya, tetapi diperkirakan berkisar 70 - 80%”. (DW Made for Minds, 2012) Hal ini jelas membuat konflik minyak antara kedua negara terus terjadi dan tidak menemukan titik temunya.

b. Konflik Perbatasan

Gambar 4.1

Masalah Perbatasan Sudan Selatan

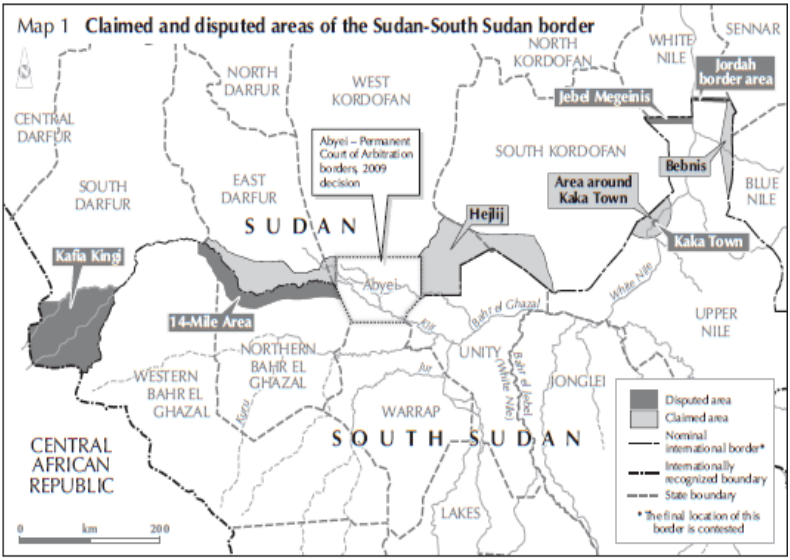

Sumber: Jozua Craze. *Contested Borders: Continuing Tensions over the Sudan – South Sudan Border. (2014)*

Konflik perbatasan ini melibatkan wilayah Kordofan Selatan, Nil Biru, dan kota Abyei (Cahyanti, 2017). Wilayah Kordofan Selatan tepatnya di ladang minyak Heglig, dikendalikan oleh Sudan Utara. *Greater Nile Oil Project* (GNOP) merupakah salah satu perusahaan minyak yang diproduksi di Heglig pada tahun 1996. Heglig dan Unity adalah proyek ladang minyak terbesar di kawasan ini. Akan tetapi, Unity sebenarnya adalah salah satu negara bagian dari Sudan Selatan dan disebut juga Nil Atas Barat yang berada di perbatasan Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Hingga pada akhirnya perebutan wilayah ini terus terjadi dengan dikerahkannya pasukan Juba yang menduduki pusat

perekonomian Sudan Utara dan mengklaim bahwa Heglig merupakan bagian dari Warrap. (Kompas.com, 2012)

Pada wilayah Abyei terdapat sumber minyak yang sangat besar, akan tetapi wilayah ini berada pada daerah perbatasan yang tidak memiliki garis pemisah yang jelas. Konflik perbatasan ini sampai sekarang belum menemui titik terang atau belum terselesaikan karena kedua negara saling tuduh menuduh satu sama lain mengenai dukungan terhadap pemberontakan di wilayah negara masing-masing. (Cahyanti, 2017) Nil Biru juga merupakan sungai yang berada di kawasan Sudan. Akan tetapi Sudan Selatan melakukan pemberontakan karena menganggap Nil Biru berada di kawasan wilayahnya karena terhubung dengan Nil Putih yang melewati kota Juba.

c. Konflik Pemimpin Pemerintahan

Konflik ini terjadi pada internal di Sudan Selatan antara Presiden Salva Kiir dengan mantan Wakil Presiden Riek Machar. Konflik ini terjadi karena tuduhan oleh Machar yang menentang kepemimpinan Presiden Kiir yang belum bisa membawa Sudan Selatan menjadi negara damai, aman dan tentram. Salva Kiir juga menuduh Riek Machar ingin mengkudeta pemerintahannya (Cahyanti, 2017, p. 88)

Konflik pemimpin pemerintahan Sudan Selatan dimulai sebagai konflik politik antara Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar pada Desember 2013. Perjanjian pembagian kekuasaan, yang ditandatangani oleh kedua pihak pada Agustus 2015, tidak mengakhiri pertempuran setelah bentrokan di Juba pada Juli 2016, Machar lantas pergi ke pengasingan, di mana ia tinggal. Kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai kejahatan perang, termasuk penjarahan, serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan penghancuran harta benda warga sipil, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan dan penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan termasuk pemerkosaan geng, dan eksekusi di luar

pengadilan. Beberapa pelanggaran juga bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Human Right Watch, 2017)

Akibat dari konflik tersebut membuat Sudan Selatan menjadi negara yang berbahaya di dunia bagi para pekerja kemanusiaan. Sejak perang Sudan Selatan dimulai pada 2013, sekitar 101 pekerja bantuan telah tewas di beberapa wilayah Sudan Selatan. Pada Desember 2017, total 22 pekerja bantuan telah diculik. Dan pada bulan April saja, tiga staf kemanusiaan tewas dan 13 diculik. (Jenssen, 2018)

Dampak dari rasa ketidakamanan ini tidak hanya mempengaruhi pekerja kemanusiaan, tetapi juga orang-orang yang mereka ingin jangkau dalam memberikan bantuan. Kehidupan seakan-akan hilang ketika bantuan tidak dapat diberikan karena pekerja bantuan dipaksa untuk mengungsi atau tidak dapat bekerja di daerah dengan kebutuhan kritis karena konflik yang sedang berlangsung di Sudan Selatan. (Jenssen, 2018) Hal tersebut lantas membuat bantuan yang masuk menjadi terhambat dan masalah krisis pangan tidak menemukan titik terang untuk terselesaikan.

B. Keterbatasan Akses Wilayah Sudan Selatan

Keterbatasan akses ini berkaitan dengan sulitnya akses jalan bagi *World Food Programme* (WFP) dalam menjangkau beberapa daerah yang mempunyai akses jalan yang rusak akibat curah hujan yang tinggi serta konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Karena Sudan Selatan merupakan kawasan yang beriklim tropis maka curah hujannya relatif tinggi. Menurut Rene McGuffin karena terjadinya musim hujan, pengiriman bantuan melewati darat sulit untuk dilakukan dan akibat hujan ini menyebabkan tersebarnya penyakit di antara warga Sudan Selatan yang mengungsi dari rumahnya masing-masing (VOA Indonesia, 2012) Untuk itu, bantuan dikirim melalui jalur udara karena hujan yang membuat sekitar 70 persen akases darat tidak dapat diakses. Adham Effendi selaku kepala logistik untuk WFP di Sudan Selatan mengatakan; (Widuri, 2018)

> "Kami sudah berada di tengah-tengah musim hujan dan sekitar 70 persen dari negara itu tidak dapat diakses, dan sebagai hasilnya, kami harus bergantung terutama pada cara-cara inovatif pengiriman kargo,"

Disamping karena curah hujan yang tinggi di Sudan Selatan sehingga membuat akses jalan sulit dilalui, telah terjadi beberapa insiden seperti pemberontakan oleh pasukan pemerintah, pembajakan bantuan makanan dan memblokir akses para pekerja kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan pada bebebrapa daerah di Sudan Selatan. (Widuri, 2018) Setidaknya 80 kali sebulan, menurut penghitungan PBB, pemerintah Sudan Selatan dan pemberontak menolak izin untuk pesawat lepas landas ketika membawa makanan darurat atau bantuan medis, atau mereka menolak akses ke seluruh kota. Kelompok-kelompok kemanusiaan mengetahui bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan memerlukan lisensi US$ 10.000 untuk setiap pekerja bantuan asing di negara itu. (Sieff, 2017) Hal ini semakin mempersulit bantuan untuk masuk di Sudan Selatan. Padahal telah terjadi kelaparan yang sangat besar pada hampir semua wilayah Sudan Selatan, akan tetapi seolah-olah pemerintah bekerjasama dengan pasukan pemberontak untuk menghalang-halangi masuknya bantuan di Sudan Selatan.

C. Ketidakstabilan Pendanaan

Pendanaan *World Food Programme* (WFP) berasal dari bantuan *Governments, Corporations* dan *Individuals*. Dana dan donor yang berasal dari *governments* adalah sumber dana utama WFP yang terdiri atas lebih dari 60 pemerintah yang berkontribusi dalam program kemanusiaan dan pembangunan dunia (World Food Programme, 2018). Dana dari pemerintah ini biasanya dalam bentuk uang tunai yang diberikan langsung kepada WFP untuk membantu negara lain dalam beberapa masalah atau konflik yang sedang terjadi. Kedua, pendanaan dan donor yang berasal dari *corporations* adalah dana yang berupa uang, produk, layanan, dan perusahaan dapat melibatkan

para karyawan dan pelanggannya dalam beberapa misi vital untuk menyelamatkan jiwa. (World Food Programme, 2018) WFP bekerja dengan perusahaan dan yayasan utama yang berkomitmen untuk mencari solusi jangka panjang untuk mengakhiri kelaparan. Mitra Kemanusiaan Global WFP berinovasi bersama untuk menemukan solusi unik dan skalabel yang memiliki dampak nyata terhadap orang-orang yang membutuhkan. Suatu perusahaan tahu bahwa dengan berinvestasi dalam *zero hunger* dapat menciptakan dunia yang lebih aman, lebih sejahtera di mana 7 miliar orang dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam ekonomi global dan menyadari potensinya masing-masing. (World Food Programme, 2018)

Dan pendanaan dan donor yang berasal dari *individuals* adalah bantuan dana berupa uang dan makanan. Menurut WFP, ketika satu individu saja mendonasikan US$15 dapat memberikan pasokan makanan selama 1 bulan kepada anak yang lapar. (World Food Programme, 2018) Dana dan donor bantuan dapat diberikan dengan 2 cara yaitu Pertama, Donasi Pertama/sekali dimana donasi dapat diberikan tergantung pada proyek atau program yang dipilih. Donasi ini diberikan untuk menyelamatkan nyawa selama keadaan darurat atau memberi anak makanan bergizi di sekolah. Durasi donasi ini hanya sekali atau pada saat itu juga. Kedua, Donasi bulanan dimana donasi ini dapat menyelamatkan jiwa banyak orang. Donasi bulanan berarti bahwa kartu kredit orang yang berdonasi disini akan ditagih setiap bulannya.

WFP didanai sepenuhnya oleh sumbangan sukarela (Voluntary donations). (United Nations Global Marketplace , 2018) Dana sukarela ini berasal dari pemerintah, perusahaan dan individu (World Food Programme, 2014) seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pendanaan yang berbasis sukarela ini dapat dibuktikan dengan beberapa berita dan dokumen yang dikeluarkan WFP dalam website resimnya. Salah satu berita diantaranya yang dikeluarkan WFP menyebutkan bahwa, WFP merupakan lembaga yang didanai sepenuhnya oleh sumbangan

sukarela, sebagai contoh dimana WFP membutuhkan US$ 88 juta untuk operasinya di Irak dari Juli hingga Desember 2014, sehingga WFP memerlukan donor dari negara lain untuk membantu mengatasi masalah di Irak (World Food Programme, 2014).

Pada dokumen yang dikeluarkan WFP dalam website resminya tentang kontribusi berdasarkan jenis donor terdapat banyak negara, perusahaan dan individu yang memberikan donor dari tahun 2013 hingga 2020. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari besaran jumlah uang tunai yang di donorkan kepada WFP. Dengan jumlah kontribusi ini, penulis mengambil contoh 6 negara dan 4 perusahaan atau lembaga internasional untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa WFP memiliki sistem pendanaan yang berbasis *voluntary*. (World Food Programme, 2018)

a. Donor Pemerintah

1. Pada tahun 2013-2015 Algeria sama sekali tidak memberikan donor kepada WFP. Tahun 2016 merupakan awal bagi Algeria untuk memberikan kontribusi donornya sebesar US$ 10,000 walaupun jumlahnya terbilang kecil dari donor negara lain. Dengan kontribusi pertama tersebut tidak membuat Algeria konsisten memberikan donornya kepada WFP, pada tahun 2017 higga 2020 Algeria sama sekali tidak memeberikan donornya kepada WFP.
2. Pada tahun 2013-2014 Argentina tidak memberikan donor sama sekali kepada WFP. Tahun berikutnya yaitu 2015 Argentina memberikan donor sekitar US$ 55,300. Akan tetapi, tahun berikutnya yaitu 2016 Argentina kembali tidak memberikan donor sama sekali, barulah di tahun 2017 Argentina kembali memberikan donor sebesar US$ 50,000. Bila dilihat donor yang diberikan di tahun 2015 dan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar US$ 5,500. Dengan penurunan jumlah donor ini membuat Argentina

kemudian di tahun 2018 hingga 2020 sama sekali tidak memberikan donornya kepada WFP.

3. Indonesia memberikan donornya kepada WFP sebesar US$ 2,819,600 pada tahun 2013. Tahun 2014-2015 Indonesia menghentikan donornya dengan tidak memberikan donor sama sekali. Tahun berikutnya yaitu 2016 Indonesia kembali memberikan donor sebesar US$ 516,224 kepada WFP. Dengan donor yang kembali diberikan Indonesia di tahun 2016 lantas tidak membuat Indonesia di tahun berikutnya kembali memberikan donornya, pada tahun 2017 hingga 2020 Indonesia sama sekali tidak memberikan kontribusi donornya kepada WFP.
4. Mexico mulai memberikan donornya kepada WFP pada tahun 2014 dengan donornya sebesar US$ 100,000. Dengan tidak memberikan donor sama sekali di tahun 2015, Mexico kembali memberikan donornya sebesar US$ 2,000,000 di tahun 2016 dan US$ 1,000,000 di tahun 2017. Akan tetapi, tahun 2018 hingga 2020 Mexico tidak memberikan donor sama sekali kepada WFP.
5. Turkey memberikan bantuan sebesar US$ 1,000,000 di tahun 2013, US$ 100,000 di tahun 2014 dan US$ 1,000,000 di tahun 2015. Tahun 2016-2017 Turkey tidak memberikan donor sama sekali kepada WFP. dan Turkey kembali memberikan bantuan sebesar US$ 106,647 di tahun 2018.
6. Pada tahun 2013 Venezuela memberikan donor kepada WFP sebesar US$ 250,000 dan tahun 2014 sebesar US$ 5,000. Dengan penurunan jumlah donor yang diberikan Venezuela kepada WFP membuat Venezuela pada tahun 2015 hingga 2020 tidak mmberikan donor sama sekali.

b. Donor Lembaga Keuangan, Penggabungan Dana, dan Donor Sektor Swasta

1. ECOWAS adalah kelompok regional dengan anggota 15 negara yang menjalankan mandat untuk mempromosikan integrasi ekonomi di semua bidang kegiatan negara-negara yang membentuknya (Economic Community of West African States, 2016). ECOWAS memberikan kontribusi donor kepada WFP pada tahun 2013 sebesar US$ 500,000. Pada tahun 2014-2016 ECOWAS tidak memberikan donor sama sekali dan tahun 2017 ECOWAS kembali memberikan donor kepada WFP sebesar US $565,000. Akan tetapi, tahun 2018 hingga 2020 ECOWAS tidak memberikan donor sama sekali kepada WFP.
2. *Inter-American Development Bank* adalah suatu lembaga keuangan yang bekerja untuk meningkatkan kehidupan di Amerika Latin dan Karibia (Inter-American Development Bank , 2018). Pada tahun 2017, *Inter-American Development Bank* mulai memberikan donor pertamanya kepada WFP sebesar US$ 100,000. Pada tahun berikutnya yaitu 2018 hingga 2020 *Inter-American Development Bank* tidak memberikan donor sama sekali kepada WFP.
3. *Union of South American Nations* (USAN, Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR) adalah organisasi internasional yang terdiri dari dua belas negara di kawasan Amerika Selatan yaitu Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Chili, Ekuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela (UNASUR, 2018). *Union of South American Nations* memberikan donor kepada WFP sebesar US$ 1,250,000 pada tahun 2013. Pada tahun berikutnya yaitu 2014 hingga 2020 *Union of South American Nations* sama sekali tidak memberikan donornya kepada WFP.
4. *International committee of the red cross* adalah komite internasional yang bekerja di seluruh dunia membantu orang-orang yang terkena dampak konflik dan

kekerasan bersenjata, dan mempromosikan aturan perang (ICRC, 2018). Pada tahun 2013, ICRC memberikan donor kepada WFP sebesar US$ 220,000. Tahun 2014-2015 ICRC tidak memberikan donor sama sekali akan tetapi, di tahun berikutnya yaitu 2016 ICRC memberikan donor hanya sebesar US$ 357. Dengan jumlah donor yang sangat sedikit di tahun 2016 membuat ICRC di tahun 2017 meningkatkan jumlah donornya sebesar US$ 582, 537. Dengan terjadinya peningkatan jumlah donor tersebut tidak membuat ICRC konsisten untuk memberikan donor kepada WFP karena di tahun 2018 hingga 2020 ICRC tidak memberikan donor sama sekali.

Berikut penulis membuat tabel untuk mempermudah melihat kontribusi donor yang diberikan negara dan lembaga lainnya seperti yang sudan dijelaskan diatas:

Tabel 4.1

Kontribusi Donor WFP Tahun 2013-2020

NO	DONOR NEGARA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	ALGERIA	-	-	-	US$ 10,000	-	-	-	-
2	ARGENTINA	-	-	US$ 55,300	-	US$ 50,000	-	-	-
3	INDONESIA	US$ 2,819, 600	-	-	US$ 516,224	-	-	-	-
4	MEXICO	-	US$ 100, 000	-	US$ 2,000, 000	US$ 1,000, 000	-	-	-
5	TURKEY	US$ 1,000, 000	US$ 100, 000	US$ 1,000 ,000	-	-	US$ 106, 647	-	-
6	VENEZUELA	US$ 250,000	US$ 5,000	-	-	-	-	-	-
NO	**DONOR LAIN-LAIN**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	ECOWAS	US$ 500,000	-	-	-	US$ 565,000	-	-	-
2	*INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK*	-	-	-	-	US$ 100,000	-	-	-
3	*UNION OF SOUTH AMERICAN NATIONS*	US$ 1,250, 000	-	-	-	-	-	-	-
4	ICRC	US$ 220,000	-	-	US$ 357	US$ 582,537	-	-	-
	Catatan: Tidak termasuk kontribusi bilateral								

Dengan mengandalkan pendanaan dan donor yang berbasis *voluntary* (Sukarela) dari *Governments*, *Corporations* dan *Individuals* WFP terus membantu menyelesaikan masalah krisis pangan Sudan Selatan sampai saat ini, akan tetapi hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan pendanaan untuk

membantu Sudan Selatan keluar dari krisis pangan yang terjadi. Dengan secara terbuka WFP mengatakan bahwa sampai saat ini mereka masih membutuhkan sekitar US$ 351,3 juta untuk memberikan bantuan makanan dan gizi hingga Januari 2019 (World Food Programme, 2018).

Untuk menunjukan dan menjelaskan tentang terjadinya ketidakstabilan pendanaan WFP di Sudan Selatan, penulis megambil contoh pada tahun 2016, 2017 dan 2018 terkait bantuan donor yang diterima oleh Sudan Selatan dari WFP. Pertama, pada Januari hingga Maret tahun 2016 terdapat sekitar 2,8 juta orang Sudan Selatan dalam keadaan darurat atau krisis pangan tidak aman menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) (World Food Programme, 2016). Pada April 2017 WFP hanya dapat membantu 1.53 juta orang Sudan Selatan, yang berarti bahwa hanya setengah dari orang Sudan Selatan yang terkena krisis pangan dapat dibantu oleh WFP. Selanjutnya, untuk menangani masalah darurat di Sudan Selatan tersebut, berdasarkan EMOP dan PRRO WFP membutuhkan total persyaratan pendanaan sekitar US$ 315.2 juta, akan tetapi dana yang berhasil terkumpul pada Mei-Oktober 2016 hanya 50% atau sebesar US$ 158.7 juta. Untuk bantuan berkepanjangan dan operasi pemulihan pada Mei-Oktober 2016 total persyaratan pendanaan yang dibutuhkan WFP sekitar US$ 173.9 juta, akan tetapi dana yang berhasil terkumpul hanya 26% atau sebesar US$ 45.9 juta. Dengan beberapa perinciannya antara lain yaitu untuk logistik membutuhkan dana sekitar US$ 71 juta, dengan dana yang terkumpul sebesar US$ 50.8 juta. Layanan kemanusiaan udara membutuhkan dana sekitar US$ 117.9 juta, dengan dana yang terkumpul sebesar US$ 68.6 juta. Dan untuk telekomunikasi darurat membutuhkan dana sekitar US$ 663,000, dengan dana yang terkumpul sebesar US$ 250,000. (World Food Porgramme, 2016)

Grafik 4.1

Dana Berdasarkan *Emergency Operation* (EMOP) dan *Protracted Relief & Recovery Operation* (PRRO) Sudan Selatan Tahun 2016

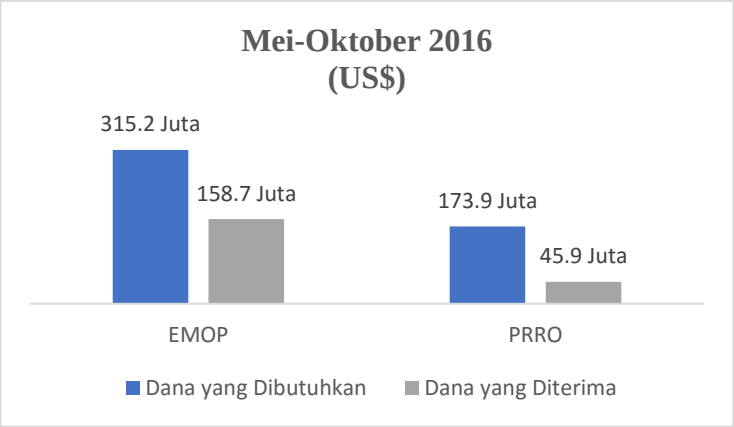

Kedua, pada Februari-April 2017 sekitar 4,9 juta orang Sudan Selatan menghadapi ketidakamanan pangan yang parah menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) (World Food Programme, 2017). Untuk menangani masalah tersebut, berdasarkan EMOP dan PRRO tahun 2017 WFP membutuhkan sekitar US$ 784 juta, akan tetapi kontribusi yang mengkonfirmasi donornya hanya sebesar US$ 128.1 juta atau hanya 16% yang berhasil didanai dengan total dana yang diterima dari April-September 2017 sebesar US$ 230.9 Juta.

Dengan beberapa perinciannya antara lain yaitu untuk operasi khusus konstruksi jalan pegumpan dana yang berhasil terkumpul hanya sebesar US$ 1 juta, dengan persyaratan dana yang dibutuhkan awal sekitar US$ 25 juta. untuk layanan kemanusiaan udara dana yang berhasil terkumpul sebesar US$ 22 juta, dengan persyaratan dana yang dibutuhkan awal sekitar US$ 58 juta. Untuk dana ketahanan pangan dan mata pencaharian berhasil terkumpul sebesar US$ 230.3 juta, dengan dana yang dibutuhkan awal sekitar US$ 689.5 juta. Dan untuk

dana logistik yang berhasil terkumpul sebesar US$ 14.6 juta, dengan dana yang dibutuhkan awal sekitar US$ 27 juta. Total dana yang tadi terkumpul US$ 128.1 juta hanya dapat membantu 1.5 juta orang, dengan target awal 2.7 juta orang. (World Food Programme, 2017)

Grafik 4.2

Dana Berdasarkan *Emergency Operation* (EMOP) dan *Protracted Relief & Recovery Operation* (PRRO) Sudan Selatan Tahun 2017

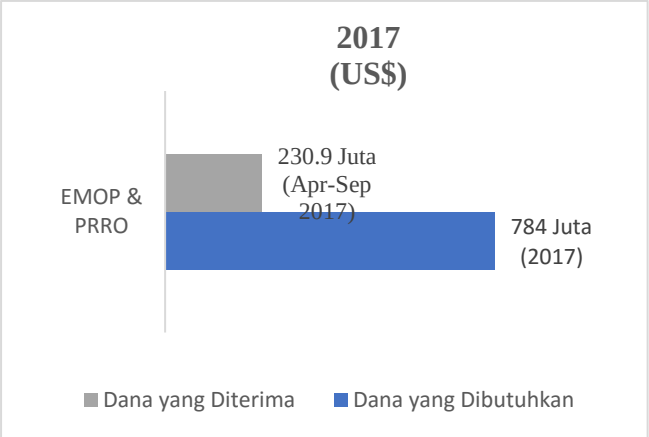

Pada tahun 2017 saat diperlukannya US$ 1,4 miliar untuk pengungsi Sudan Selatan, *Executive Director* WFP yaitu David Beasley menyatakan bahwa: (UNHCR, 2017)

> *"Our funding situation forced us to cut food rations for many refugees in Uganda,"*

dan lebih lanjut Basley menjelaskan bahwa:

> *"I find that unacceptable, and I hope you do too. These are families like yours and mine, our brothers and sisters, and the world must help them now – not later. Please help us do the job these people need us to do"*

Dengan pernyataan tersebut menandakan bahwa WFP benar-benar tidak dapat menolong pengungsi yang berasal dari Sudan Selatan di Uganda, karena situasi pendanaan WFP yang tidak mencukupi sehingga memaksanya untuk memotong jatah makanan bagi para pengungsi. Hal tersebut akan semakin memperburuk keadaan krisis pangan rakyat Sudan Selatan.

Ketiga, pada Januari-Maret 2018 sekitar 5,1 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) (World Food Programme, 2018). Untuk menangani masalah tersebut, WFP membutuhkan dana sekitar US$ 1.06 miliar pada tahun 2018, dengan total dana yang terkumpul pada Februari-Juli 2018 hanya sebesar US$ 319 juta. Dengan salah satu perinciannya antara lain yaitu untuk dana ketahanan pangan dan mata pencaharian berhasil terkumpul sebesar US$ 467.2 juta, dengan dana yang dibutuhkan awal sekitar US$ 689.5 juta. (World Food Programme, 2018)

Grafik 4.3

Dana Berdasarkan *Interim Country Strategic Plan* (ICSP) Sudan Selatan Tahun 2018

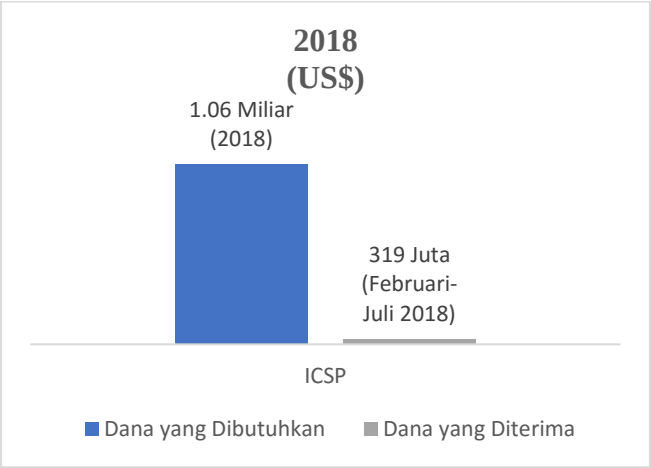

Target atau dana awal dengan dana yang terkumpul diatas menunjukan bahwa bantuan yang masuk di Sudan Selatan masih sangat rendah. Banyak dari dana yang terkumpul tidak dapat menolong jutaan jiwa rakyat Sudan Selatan yang membutuhkan bantuan, karena dana yang masuk pada WFP tidak memenuhi syarat dana yang dibutuhkan oleh Sudan Selatan. Hal ini terjadinya ketidakstabilan dana karena komitmen negara anggota WFP dalam memberikan dana di Sudan Selatan tidak baik, dimana pada tahun 2015/2016 hanya ada 13 negara yang memberikan donornya kepada Sudan Selatan (World Food Programme, 2016). Sementara itu pada tahun berikutnya yaitu 2017 ada beberapa negara yaitu seperti china, Qatar dan Korea Selatan yang sebelumnya di tahun 2016 memberikan donor kemudian di tahun 2017 negara tersebut tidak lagi memberikan donornya (World Food Programme, 2017).

Bila dilihat dari tahun 2016 hingga Januari 2018 jumlah rakyat Sudan Selatan yang mengalami masalah ketidakamanan pangan pun terus bertambah yaitu dari yang hanya sekitar 2,8 juta orang di tahun 2016 naik menjadi 5,1 juta orang di tahun 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa bantuan yang diberikan WFP masih sangat rendah dan tidak stabil sehingga menghambat jalannya program WFP dalam menyelesaikan masalah krisis pangan di Sudan Selatan. Memang bantuan WFP dapat membantu mengatasi sebagian atau beberapa masalah pangan di Sudan Selatan, akan tetapi bantuan yang diberikan WFP hanya dapat menolong rakyat Sudan Selatan pada jangka pendek saja. Padahal untuk menyelesaikan masalah pangan atau krisis pangan di Sudan Selatan dibutuhkannya dana yang sangat besar agar masalah yang terselesaikan bisa berjangka panjang dan terselesaikan.